

## **SKRIPSI**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA ATAU MEMILIKI SENJATA TAJAM TANPA IZIN**

**( Studi Kasus Putusan No. 2062/PID.B/2016/PN.MKS. )**



**OLEH:**

**TASHAN MUH. AKRAM N**

**B111 13 540**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2017**

**TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA ATAU MEMILIKI SENJATA  
TAJAM TANPA IZIN**

**(Studi Kasus Putusan No. 2062/PID.B/2016/PN.MKS)**

**OLEH :**

**TASHAN MUH. AKRAM N**

**B111 13 540**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Pada Departemen Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2017**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA ATAU MEMILIKI SENJATA TAJAM TANPA IZIN**

**(Studi Kasus Putusan No. 2062/Pid.B/PN.MKS)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**TASHAN MUH. AKRAM N**

**B111 13 540**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Selasa, 19 September 2017  
Dan Dinyatakan Diterima

#### **Panitia Ujian**

**Ketua,**



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.Hum., M.Si.  
NIP. 19620711 198703 1 001

**Sekretaris,**



Dr. Haeranah, SH., MH  
NIP. 19661212 199103 2 002

**A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Pengembangan**



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.  
NIP. 19610607 198601 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Tashan Muh. Akram N

NIM : B111 13 540

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa atau Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin (studi kasus putusan No. 2062/Pid.B/2016/PN.MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi.

Makassar, Maret 2017

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhammad Said Karim, SH., M. Hum., M. Si

NIP : 19620711 198703 1 001

Pembimbing II



Dr. Haeranah, SH., MH

NIP : 19661212 199103 2 002



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: TASHAN MUH AKRAM N
Nomor Pokok	: B11113540
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan No.2062/Pid.B/2016/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2017

  
Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH., MH  
NIP. 19610607 198601 1 003

## **ABSTRAK**

**Tashan Muh. Akram N, B11113540, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Membawa atau Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin**, dibawah bimbingan bapak **Prof. Dr. Muhammad Said Karim, SH., M.Hum., M.si** selaku pembimbing I dan ibu **Dr. Haeranah, SH., MH** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil oleh hakim terhadap tindak pidana tanpa hak membawa, menguasai, senjata tajam pada perkara No.2062/Pid.B/PN/.MKS. dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana tanpa hak membawa menguasai senjata penikam atau penusuk pada perkara No. 2062/Pid.B/PN.MKS.

Penelitian ini dilakukan di instansi atau lembaga Pengadilan Negeri Makassar, dengan pertimbangan bahwa, merupakan tempat diputuskannya perkara pidana dengan putusan nomor 2062/Pid.B/2016/PN.MKS, serta melakukan penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini.

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan hukum pidana materil pada putusan No. 2062/Pid.B/2016/PN.MKS telah sesuai dengan penerapan hukum dan memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur dari UU No. 2062/Pid.B/2016/PN.MKS. berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Terdakwa yang dianggap sehat, tidak memiliki gangguan pada mental dianggap mampu memepertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim yakni 9 bulan penjara dikurangi masa tahanan dan membayar sejumlah biaya perkara.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 2062/Pid.B/2016/PN.MKS penulis anggap telah tepat dalam menjatuhkan putusan. Dalam memutus perkara hakim harus mempertimbangkan banyak hal. Mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan maka dengan terpenuhinya unsur-unsur yang sesuai dengan pasal yang di dakwakan, maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa sudah tepat.

**Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, tindak pidana membawa atau memiliki senjata tajam tanpa izin**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan hidayah Nya karena berkat izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin ( Studi Kasus Putusan No.2062/ Pid.B/ 2016/ PN.Makassar )** . Skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat yang harus di penuhi oleh setiap mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada orang tua yang selalu ingin penulis banggakan dan bahagiakan yaitu, Ayahanda tercinta **Ir. H. Nuraidi Aminullah S.P** dan Ibunda tercinta **Hj. Asfhiani Tashan S.TP**, karena telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mencintai dan selalu senantiasa mendoakan untuk keberhasilan penulis sebagai anak dari pertama dari tiga bersaudara. Dan tak lupa pula kepada adik **Tashan**

**Muhammad Akhsan Nuraidi** dan **Tashan Muhammad Akmal Nuraidi** serta seseorang terkasih yang penulis sangat sayangi **Vidya Nur Fitrah S.H** makasih sudah mendengar keluh kesah dari penulis, selalu mendampingi penulis, memberikan motivasi yang bermanfaat kepada penulis sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan dengan baik;

dan seluruh keluarga yang telah banyak memberi bantuan moril dan materil, dorongan, doa dan semangat kepada penulis selama ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin besertajajarannya;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, besertajajarannya;
3. Bapak selaku pembimbing I Prof. Dr. Muhammad Said Karim ,S.H.,M.,Hum.,M.Si dan Ibu Dr. Haerana, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, bantuan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H, Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H dan Ibu Dr. Nur Azisa ,S.H., M.H, selaku tim



penguji yang memberikan kritik dan saran untuk menjadikan skripsi penulis ini lebih baik;

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Unhas;
6. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Unhas yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama kuliah hingga penyelesaian skripsi ini;
7. Staf Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan selama penelitian penulis;
8. Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ASAS 2013, dan Keluarga Besar HLSC 2013;
9. Makasih kepada teman - teman Gercep, Safety (vikar, satya, mika, wawan, mail, wawin, fadel, kipli, basuki, andre, eko, rais, fadly, billy, fiqri, satria, pare, fahrul, agungnasu, ebi, grady, idi, ivantry, fafa, eki, arierichfan, rinaldy, taufiq hidayat, alfa) yang telah memberi support dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
10. Makasih kepada teman – teman seperjuangan kipli, agung nasu, fahrul, billy telah memberi support dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

11. Teman - teman dari Hertasning kepada Dirga Matrul, Rakhmat Tri Hafidz, Reski Lavista yang sudah seperti saudara penulis dan selalu mendengar keluh kesah penulis kapanpun dimanapun;
12. Teman – teman Syndrome Family ( uci lopul, aldhy gits, anjasroem, aprilano alif, aat, bian ahmad, datra, didi culla, fari, fiqri monoarfa, ials, ince, dadang ) semua teman tanpa terkecuali terima kasih atas dukungan dalam bentuk apapun kepada penulis
13. Teman – teman SD, SMP, SMA dan semua teman tanpa terkecuali terima kasih atas dukungan dalam bentuk apapun kepada penulis
14. Senior-senior dan junior-junior saya yang ada difakultas Hukum Universitas hasanuddin tanpa terkecuali
15. Terima kasih kepada tokoh inspiratif saya **Bob Marley** yang telah memberikan ilmu kepada penulis yang sangat amat bermanfaat
16. Teman-teman KKN Sapanang Gel. 93 Kabupaten Pangkep, Kecamatan Bungoro, Kelurahan sapanang, terimakasih telah menjadi teman hidup selama hampir 2 bulan dan membuat cerita baru dalam hidup penulis;
17. Untuk Bapak Lurah, Ibu Lurah, ibu posko dan bapak posko yang sudah seperti orang tua penulis selama KKN, yang selalu mendoakan untuk kesuksesan penulis;
18. Semua pihak yang telah membantu yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga

ke depannya penulis bisa lebih baik lagi. Wassalamu Alaikum  
Warahmatullahi Wabarokatuh.

Makassar, Oktober 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>- BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
<b>- BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
<b>A. Tindak Pidana.....</b>	<b>9</b>
1. Pengertian Tindak Pidana.....	9
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	11
<b>B. Pidana Dan Pemidanaan.....</b>	<b>13</b>
1. Pengertian Pidana.....	13
2. Pengertian Pemidanaan.....	13
3. Teori Pemidanaan.....	14
4. Jenis-jenis Pidana.....	16
<b>C. Tindak Pidana Membawa atau Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin.....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian Senjata Tajam.....	22
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam .....	24
<b>D. Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Hakim Dalam Memutus Perkara.....</b>	<b>25</b>
1. Faktor Yuridis .....	25
2. Faktor Nonyuridis.....	31
<b>- BAB III Metode Dan Lokasi Penelitian.....</b>	<b>32</b>

1. Lokasi penelitian.....	32
2. Jenis Dan Sumber Data .....	32
3. Teknik Pengumpulan Data.....	32
4. Teknik Analisis Data.....	33
<b>- BAB IV Pembahasan.....</b>	<b>34</b>
1. Penerapan Hukum Pidana Materiil Pada Putusan No.2062/Pid.B/2016/PN.Mks. atas Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin.....	34
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan No.2062/Pid.B/PN.MKS.....	48
<b>- BAB V Penutup.....</b>	<b>61</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>61</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Meningkatnya perkembangan dan pembangunan tidak dapat dipungkiri sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Suatu kenyataan bahwa didalam pergaulan kelompok maupun individu seringkali terjadi degradasi moral akibat berbagai macam perilaku yang jauh dari nilai, moral, dan norma yang mengakibatkan penurunan harkat dan martabat manusia, karena kualitas kemanusiaan selalu berkenaan dengan penerapan nilai, norma, dan moral. Perubahan sikap, tingkah laku, dan pola pikir setiap orang berbeda-beda. Perbedaan yang terjadi akhirnya menjadi permasalahan di antara masyarakat itu sendiri. Permasalahan yang muncul sangatlah kompleks. Tidak jarang masalah tersebut berakhir dengan perselisihan, perkelahian, bahkan pembunuhan.

Masyarakat yang selalu dihadapkan oleh masalah, pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya, dalam hal ini hukum bekerja dan diperlukan. Dengan adanya hukum dapat terjaga keseimbangan, ketertiban serta kesejahteraan dalam masyarakat maka setiap tindakan yang dilarang dapat

dikategorikan sebagai tindak pidana atau pelanggaran akan dijatuhi hukuman.

Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana.Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum.

Sebagai warga negara yang baik sudah semestinya kita mengetahui serta taat terhadap peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah melalui lembaga legislative yang sering kita sebut Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR) dengan undang-undang yang telah dibuat olehnya sebagai hukum yang berlaku diwilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat NKRI).

Saat ini kejahatan dengan menggunakan senjata api ataupun senjata tajam sangatlah sering terjadi khususnya di wilayah Kota Makassar seperti yang diberitakan di televisi, koran, maupun radio. perampokan, penculikan, curanmor, bahkan pembegalan sudah tidak asing lagi kita dengar diberitakan. Tindak

pidana tersebut sering dilakukan dengan menggunakan senjata api ataupun senjata tajam.

Salah satu jenis senjata tajam yang saat ini sangat sering disalah gunakan yaitu anak panah dan ketapel. Ketapel biasanya terbuat dari kayu, bambu, maupun rotan yang telah dibuat sedemikian rupa membentuk huruf Y dan dikaitkan dengan karet elastis yang dapat melontarkan panah, sedangkan anak panah dibuat dari besi, kaca, batu, tulang maupun bahan keras lainnya. Fungsi dari anak panah ini adalah untuk melindungi batang/badan anak panah dan kemampuannya dalam mengenai target. Diameter anak panah yang kecil akan membuat anak panah mampu meluncur menjadi lebih cepat tetapi kerusakan yang dihasilkan akan lebih lemah. Sebaliknya dengan diameter yang besar maka kerusakan yang ditimbulkan juga akan semakin besar. Ketapel dan anak panah dikategorikan sebagai sebuah senjata yang dipergunakan untuk menembakkan anak panah, dibantu oleh kekuatan elastisitas dari ketapel itu sendiri.

Kepemilikan senjata tajam baik yang ilegal maupun yang legal tidak mampu mendapat pengawasan dari masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, hal ini lah yang menjadi pemicu meningkatnya kejahatan yang melibatkan senjata tajam dalam melancarkan aksi pelaku. Hal ini sangat membutuhkan perhatian juga pengawasan khusus dari pihak yang berwajib.



Dalam hal peningkatan kejahatan dengan menggunakan senjata tajam tersebut maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Darurat (selanjutnya disingkat Drt) No. 12 tahun 1951 sebagai usaha preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata tajam dalam suatu kejahatan. Undang-Undang Drt No. 12 Tahun 1951 ini selain mengatur senjata api dan bahan peledak juga didalamnya mengatur tentang senjata tajam. Dalam undang-undang ini, senjata tajam yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau mata pencaharian yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang boleh digunakan di kepentingan sehari-hari.

Contoh petani yang membahwa golok untuk mencangkul sawah, seorang ibu rumah tangga yang menggunakan pisau yang berjualan untuk mencari nafkah anak istrinya di perbolehkan karena senjata tersebut dipergunakan untuk membantu pekerjaannya sebagai seorang petani, ibu rumah tangga atau pengrajin pisau tersebut begitupun untuk barang pusaka kuno merupakan suatu pengecualian dalam Undang-undang No.12 tahun 1951 diharuskan dalam mempergunakannya alat untuk membawanya telah mendapat izin dari kepolisian atau barang pusaka yang dibawa telah terdaftar ke KEMENDIKBUD sebagai barang pusaka yang sudah bersertifikat, dan di gunakan untuk kepentingan adat atau upacara adat.

Beda halnya jika senjata tajam tersebut dibawa atau disimpan untuk dipergunakan dalam melancarkan kejahatan. Banyaknya pemberitaan tentang pembegalan di kota Makassar yang menggunakan senjata tajam anak panah atau biasa disebut busur membuat masyarakat menjadi resah. Berkendara pada jam-jam tertentu menjadi berbahaya karena seringnya ada anak panah yang melayang namun tidak diketahui asal usulnya. Masyarakat merasa tidak aman lagi berkendara pada malam hari.

Salah satu kasus kepemilikan senjata tajam yg akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini adalah kasus putusan Nomor :2062/ Pid.B/2016/PN.MKS. Kronologis kejadian berawal ketika pelaku yang sedang berboncengan sepeda motor dengan temannya melintas di jalan AP. Pettarani melihat aparat kepolisian yang sedang patroli melintas di jalan tersebut dan melihat pelaku sementara berboncengan tiga kemudian langsung diberhentikan tepat di jalan AP. Pettarani depan PWI dan saat dilakukan pemeriksaan dimana ditemukan pada diri pelaku membawa 1 (satu) buah ketapel yang berbentuk Y dan 1 (satu) buah anak panah (busur) yang disimpan di saku sweater sebelah kiri pelaku, kemudian pelaku di amankan bersama dengan barang bukti di bawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan senjata tajam. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum atau Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Membawa atau Memiliki Senjata Tajam Tanpa izin (studi kasus putusan No. 2062/Pid.B/2016/PN.MKS.)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana Materiil terhadap tindak pidana membawa atau memiliki senjata tajam tanpa izin dalam putusan No. 2062/Pid.B/2016/PN.MKS?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No.2062/Pid.B/PN.MKS?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil oleh hakim terhadap tindak pidana tanpa hak membawa, menguasai, senjata tajam pada perkara No.2062/Pid.B/PN/MKS

- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana tanpa hak membawa menguasai senjata penikam atau penusuk pada perkara No. 2062/Pid.B/PN.MKS

## 2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya memberikan manfaat dan kegunaan yang terdapat pada penelitian tersebut.

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah :

### a) Manfaat Teoritis

- a. Merupakan salah satu sarana untuk berbagi pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya
- b. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut

### b) Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal di masa depan kelak.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda, *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana<sup>1</sup>.

Berikut pengertian Tindak Pidana menurut para ahli :

- a. Moeljatno berpendapat bahwa Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut<sup>2</sup>.
- b. Bambang Poernomo berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *asas-asas hukum pidana di indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2003, Hal 59

<sup>2</sup> Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hal 54

<sup>3</sup> Bambang Poernomo, *asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1992, Hal 130

- c. Simons berpendapat bahwa, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab<sup>4</sup>. Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana<sup>5</sup>. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).
- d. Komariah E. Sapardjaja berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu<sup>6</sup>.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil<sup>7</sup> :

- a. Dikatakan formil karena undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu di sertai ancaman sanksi barangsiapa yang melanggar atau mengabaikannya.

---

<sup>4</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 97

<sup>5</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 72

<sup>6</sup>Chairul Huda, *Dari tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm 27

<sup>7</sup>A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 242

- b. Dikatakan materil karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian di dalam undang-undang, masih harus di teliti tentang penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela dan patut di pidana perbuatannya atau tidak tercela, ataupun di pandang sifatnya terlampau kurang celaannya sehingga pembuatnya tak perlu di jatuhi sanksi hukum pidana, tetapi cukup di kenakan sanksi kaidah-kaidah hukum lain atau kaidah sosial lain

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur, untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan berbagai unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari perbuatan yang dilarang sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Menurut Lamintang bahwa setiap tindak pidana dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif.

- a. Unsur Objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang

dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

- b. Unsur Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>8</sup>

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Berikut beberapa unsur tindak pidana menurut para ahli<sup>9</sup>:

- 1) Loebby Loqman:
  - a. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
  - b. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
  - c. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
  - d. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan<sup>10</sup>
- 2) EY. Kanter dan SR.Sianturi:
  - a. Subjek
  - b. Kesalahan
  - c. Bersifat melawan Hukum (dan tindakan);
  - d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
  - e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)<sup>11</sup>
- 3) Simons:
  - a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
  - b. Bertentangan dengan hukum;
  - c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
  - d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya<sup>12</sup>.
- 4) Moeljatno:
  - a. Perbuatan;
  - b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
  - c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
- 5) R.Tresna:
  - a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
  - b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Diadakan tindakan penghukuman

- 6) Unsur tindak pidana dalam KUHPidana yaitu:

---

<sup>8</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta,2010 hlm 79

<sup>9</sup>*ibid*

<sup>10</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011 hlm 99

<sup>11</sup>*ibid*

<sup>12</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 88



- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

## **B. Pidana dan Pemidanaan**

### **1. Pengertian Pidana**

Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh Negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum<sup>13</sup>. Pidana adalah sanksi yang hanya ada dalam hukum pidana. Jika dikaitkan dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras. Dalam lapangan hukum pidana sanksi yang terberat berupa pidana badan, pidana atas kemerdekaan, bahkan pidana jiwa.<sup>14</sup>

### **2. Pengertian Pemidanaan**

Menurut Hart ada lima elemen terkait pemidanaan<sup>15</sup>:

- a. Pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan

---

<sup>13</sup>Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014 hlm 385

<sup>14</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, (PT. Refika Aditama, Bandung, 2011), hlm 139

<sup>15</sup>Op Cit, hal 386

- b. Pidana dan pemidanaan ditujukan untuk suatu pelanggaran terhadap hukum
- c. Harus sesuai antara pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku yang melakukan kejahatan
- d. Pemidanaan itu dijalankan oleh pelaku yang melakukan kejahatan
- e. Pidana itu dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang dalam sistem hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan

Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan agar tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan yang serupa.

### 3. Teori Pemidanaan

Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan<sup>16</sup>.

#### a. Teori Pembalasan

Teori Pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan "*Fiat justitia ruat coelom*" (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat

---

<sup>16</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, (PT. Refika Aditama, Bandung, 2011), hlm 141-144

terakhir harus menjalankan pidananya). Teori pembalasan pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

- a) Teori pembalasan yang obyektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana<sup>5</sup> atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
- b) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

#### b. Teori Tujuan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.

#### c. Teori Gabungan

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri

maupun kepada masyarakat. Teori gabungan ini mengutamakan perhatiannya kepada si pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana ini didasarkan pada berat dan ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, tujuan pidana untuk mengubah tingkah laku dan kepribadiansi pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah untuk memperbaiki pelaku tindak pidana. Teori inilah yang dianut oleh rancangan KUHPidana.

#### 4. Jenis-jenis Pidana

##### a. Pidana Pokok

Berdasarkan Pasal 10 KUHPidana pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Urut-urutan pidana pokok tersebut berdasarkan tingkatan berat-ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan. Prinsip umum dalam penjatuhan pidana pokok berdasarkan KUHPidana adalah hakim dilarang menjatuhkan lebih dari satu pidana pokok. Oleh karena itu ancaman pidana dalam KUHPidana pada

umumnya bersifat alternative antara pidana penjara dan pidana denda<sup>17</sup>.

b. Pidana Mati

Sebagaimana Pasal 11 KUHPidana yang berbunyi:

“Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”<sup>18</sup>

Hukuman mati adalah hukuman terberat. Berdasarkan Pasal 11 KUHPidana, hukuman mati yang demikian dianggap tidak manusiawi sehingga diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan umum Dan Militer. Berdasarkan undang-undang tersebut, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan tembak mati dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan pada pengadilan tingkat pertama. Selama menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana tersebut.

---

<sup>17</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014) hlm 387

<sup>18</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Politeia, Bogor, 1995), hlm 36

c. Pidana penjara

Pidana penjara adalah merupakan pidana yang paling banyak dimuat dalam KUHPidana dan ketentuan pidana lainnya. Pidana penjara adalah pidana berupa pembatasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana ke dalam suatu rumah penjara. Diharapkan, dengan adanya perampasan kemerdekaan si terpidana akan menjadi tidak bebas untuk mengulangi tindak pidana dan selama waktu dirampasnya kemerdekaan itu, si terpidana juga diharapkan melakukan perenungan untuk menyadari kesalahan yang telah dibuatnya.<sup>19</sup>

d. Pidana Kurungan

Pidana kurungan ditujukan kepada perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Kendati demikian ada juga beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan, jika dilakukan karena suatu kealpaan dan ancaman pidana kurungan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut di alternatifkan dengan pidana penjara. Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>19</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, (PT. Refika Aditama, Bandung, 2011), hlm 146

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHPidana<sup>20</sup>.

e. Pidana Denda

Salah satu alasan adanya pidana denda karena keberatan terhadap pidana badan dalam jangka waktu singkat. Beberapa keuntungan pidana denda adalah: pertama, pidana denda tidak menyebabkan stigmatisasi. kedua, pelaku yang dikenakan pidana denda dapat tetap tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya. ketiga, pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaan. keempat, pidana denda dengan mudah dapat dieksekusi. kelima, negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda. Namun demikian terdapat sisi lemah dari pidana denda yang hanya menguntungkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan finansial lebih. Jika pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan.<sup>21</sup>

f. Pidana Tutupan

Pidana tutupan dalam konteks hukum pidana Indonesia adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan. Pidana Tutupan ditujukan bagi pelaku

---

<sup>20</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012) hlm 52

<sup>21</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014), hlm 401

kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, namun motivasi dalam melakukan kejahatan tersebut patut dihormati<sup>22</sup>. Dapatlah dikatakan bahwa pidana tutupan diperuntukkan bagi pelaku kejahatan politik. Terpidana yang menjalani pidana tutupan, wajib menjalankan pekerjaan. Demikian pula semua peraturan yang terkait pidana penjara juga berlaku bagi pidana tutupan<sup>23</sup>.

## 5. Pidana Tambahan

Berdasarkan KUHPidana, pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang dan pengumuman putusan hakim. Akan tetapi di luar KUHPidana, terdapat banyak pidana tambahan yang berbeda dengan apa yang dicantumkan dalam KUHPidana. Hal ini tertuang dalam undang-undang pidana khusus, baik undang-undang pidana maupun yang bukan undang-undang pidana<sup>24</sup>.

### 1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Hak-hak terpidana yang dapat dicabut sebagai pidana tambahan adalah<sup>25</sup>:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- b. Hak memasuki angkatan bersenjata
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

---

<sup>22</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung, 1996, hlm 45

<sup>23</sup> Ibid, hlm 402

<sup>24</sup> OpCit

<sup>25</sup> Pasal 35 KUHPidana



- d. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
- f. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu
- g. Perampasan barang-barang tertentu  
Perampasan terhadap barang-barang tertentu dalam KUHPidana diatur sebagai berikut:
  - a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan
  - b. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang
  - c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang yang telah disita.

## 2. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius. Hal ini karena secara langsung menyentuh nama baik dan martabatnya. Pengumuman putusan hakim di satu sisi merupakan pidana tambahan, namun di sisi lain menunjukkan karakter sebagai suatu tindakan atau maatregel yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat.

## C. Tindak Pidana Membawa atau Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin

### 1. Pengertian Senjata Tajam

Senjata Tajam adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik<sup>26</sup>.

Berdasarkan Undang-undang (Drt) No . 12 Tahun 1951 yang dimaksud senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).<sup>27</sup>

Dalam Undang-undang Pasal 2 ayat (1) (Drt) No. 12 tahun 1951 dijelaskan bahwa:

"Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul , senjata penikam atau

---

<sup>26</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Senjata> , diakses pada tanggal 9 Maret 2017, Pukul 13:43 WITA

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentar 1*, PT Pradnya Paramita, 1978, Hal 10

senjata penusuk (*slagsteek-of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun”.<sup>28</sup>

Dalam prakteknya biasa diterapkan bahwa dalam melakukan pembunuhan atau penganiayaan maka diterapkan undang-undang ini untuk senjata yang dipakai tanpa memperhatikan penafsiran-penafsiran karena nyata senjata itu telah dipakai (jadi telah bertujuan) menjadi senjata.

Berikut adalah senjata tradisional dari tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia<sup>29</sup>:

- a. Senjata tradisional Nangro Aceh Darusalam : Rencong.
- b. Senjata Tradisional Sumatra Utara : Piso Gaja Dompok.
- c. Senjata Tradisional Sumatra Barat : Karih, Ruduih, Piarit.
- d. Senjats Tradisional Provinsi Kepulauan Riau : Jenawi.
- e. Senjata Tradisinional Provinsi Jambi : Badik Tumbuk Lada.
- f. Senjata Tradisional Provinsi Sumatera Selatan: Tombak Trisula.
- g. Senjata Tradisional Provinsi Lampung : Terapang, Pehduk Pay
- h. Senjata Tradisional Provinsi Bengkulu : Kuduk, Badik, Rudus.
- i. Senjata Tradisional Provinsi DKI Jakarta : Badik, Parang, Golok.
- j. Senjata Tradisional Provinsi Jawa Barat: Kujang.
- k. Senjata Tradisional Provinsi Jawa Tengah: Keris.
- l. Senjata Tradisional Provinsi DI Yogyakarta : Keris Jogja.
- m. Senjata Tradisional Provinsi Jawa Timur : Clurit.
- n. Senjata Tradisional Provinsi Bali : Keris
- o. Senjata Tradisional Provinsi Nusa Tenggara Barat: Keris, Sampari, Sondi.
- p. Senjata Tradisional Provinsi Nusa Tenggara Timur: Sundu.
- q. Senjata Tradisional Provinsi Kalimantan Tengah: Mandau, Lunjuk Sumpit Randu.

---

<sup>28</sup>Ibid, hal 10

<sup>29</sup><http://www.berbagaireviews.com/2015/03/gambar-dan-daftar-lengkap-nama-nama.html>  
diakses pada tgl 9 Maret 2017, Pukul 14.45 WITA

- r. Senjata Tradisional Provinsi Kalimantan Selatan: Keris, Bujak Beliung.
- s. Senjata Tradisional Provinsi Kalimantan Timur: Mandau.
- t. Senjata Tradisional Provinsi Sulawesi Utara: Keris, Peda, Sabel.
- u. Senjata Tradisional Provinsi Sulawesi Tengah: Pasatimpo
- v. Senjata Tradisional Provinsi Sulawesi Selatan: Badik.
- w. Provinsi Sulawesi Barat - Senjata Tradisional :Tombak.
- x. Senjata Tradisional Provinsi Maluku : Parang Salawaki / Salawaku, Kalawai.
- y. Senjata Tradisional Provinsi Irian Jaya: Pisau Belati.
- z. Provinsi Papua Barat - Senjata Tradisional :Busur dan Panah.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam**

Berdasarkan Undang-undang (Drt) NO. 12 Tahun 1951

unsur-unsur tindak pidana membawa senjata tajam yaitu:

- a. Pasal 2 ayat (1):
  - Barangsiapa
  - Yang tanpa hak,
  - Memasukkan ke Indonesia, Membuat , menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag of stoot wapen*)

## **D. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Hakim dalam Memutus Perkara**

- Faktor Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam

persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan . Pada tulisan ini, yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah: Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

Pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim unsur-unsur (*bestanddelen*) dari suatu tindakan pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/dictum putusan hakim

#### 1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana itu dilakukan.<sup>31</sup> Surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara jelas dan lengkap mengenai .<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT . Grafindo Persada, Yogyakarta, 2006, Hal 124-125

<sup>31</sup>ibid

<sup>32</sup>Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, P.T Alumni, Bandung, 2006, hlm 44

1. Tindak pidana yang dilakukan;
2. Pelaku tindak pidana/siapa yang melakukan tindak pidana tersebut;
3. Dimana tindak pidana tersebut dilakukan (*Locus Delicti*);
4. Kapan tindak pidana tersebut dilakukan (*Temepus Delicti*);
5. Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan;
6. Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana (delik-delik lain);
7. Ketentuan pidana yang diterapkan/pasal yang didakwakan.

## 2. Keterangan Terdakwa

menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para aksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggunakan istilah ‘keterangan terdakwa’ bukan ‘pengakuan terdakwa’ dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau

penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.<sup>33</sup>

### 3. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau ke saksian *de auditu* testimonium *de auditu* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti sah.

Kesaksian *de auditu* merupakan keterangan-keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang dapat dilihat atau dialami, bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh orang lain tersebut. Keterangan demikian ini dalam ilmu hukum acara pidana disebut pula dengan istilah *testimonium de auditu* atau *hearsey evidence*.

---

<sup>33</sup>ibid

Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di pengadilan. Oleh karena itu, hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu, sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan, yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang ia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan dialami sendiri. Apabila ternyata yang akan diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang ia tidak dengar, lihat, dan dialami sendiri, sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya atau tidak perlu mendengar lebih lanjut keterangannya dan memerintahkan keluar dari ruang sidang. Dengan demikian akan terhindar dari kesaksian *de auditu*, berarti pula hanya akan dihasilkan kesaksian yang bernilai alat bukti yang sah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan hakim dalam putusannya.<sup>34</sup>

#### 4. Barang-barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;

---

<sup>34</sup>Op Cit hal. 130-11



- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Barang bukti yang dimaksud diatas tidak termaksud alat bukti, sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dakwa. meskipun bukan sebagai alat namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya, kemudian mengajukan barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti ini

juga ada dan cenderung dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>35</sup>

#### 5. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum yang mengformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar ppidanaan atau tindakan oleh hakim. Sesuai ketentuan Pasal 197 butir e KUHAP bahwa :

Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ppidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa

Dalam praktek persidangan, Pasal peraturan hukum pidana selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim harus berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti yang diajukan kedepan persidangan tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana tersebut<sup>36</sup>

#### - Faktor Nonyuridis

---

<sup>35</sup> Ibid, Hal 133-134

<sup>36</sup> [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org) diakses pada tanggal 9 Maret 2017, Pukul 14.48

- a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa
- b. Akibat Perbuatan Terdakwa
- c. Kondisi Diri Terdakwa
- d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian ini dilakukan di instansi atau lembaga Pengadilan Negeri Makassar, dengan pertimbangan bahwa, merupakan tempat diputuskannya perkara pidana dengan putusan nomor 2062/Pid.B/2016/PN.MKS.

#### **2. Jenis dan Sumber Data**

Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni:

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan yaitu wawancara langsung di Pengadilan Negeri Makassar.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh peneliti berupa sumber-sumber tertentu seperti catatan, laporan historis, maupun arsip yang diperoleh peneliti dari Pengadilan Negeri Makassar.

#### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1. Wawancara**

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara

dengan pihak-pihak yang berkompeten dan objek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini, seperti korban, hakim, dan atau polisi.

## 2. Studi dokumen

Dilakukan dengan pengumpulan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari artikel-artikel pada majalah-majalah, tabloid-tabloid, surat kabar dan buku-buku bacaan lainnya dan peraturan perundang-undangan atau referensi lainnya yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

## 4. Teknik Analisis Data

Di dalam pelaksanaan penelitian ini nantinya data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yang didasari oleh teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan dan literature yang ada, yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana dikemukakan di atas, kemudian hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk penjelasan dan penggambaran kenyataan-kenyataan atau kondisi objektif yang ditemukan peneliti di lokasi.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Penerapan Hukum Pidana Materiil Pada Putusan No.2062/Pid.B/2016/PN.Mks. atas Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin.**

Sebelum membahas penerapan Hukum Pidana pada putusan No.2062/Pid.B/2016/PN.Mks. terlebih dahulu penulis akan jelaskan ringkasan posisi kasus. Berdasarkan analisa dari pengakuan terdakwa, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan pada tahap penyidik , penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan yaitu sebagai berikut :

##### **1. Identitas Terdakwa**

Nama	: Muhammad Asdi Pratama Bin Asrul
Tempat Lahir	: Makassar
Umur atau Tanggal lahir	: 21 tahun / 15 Januari 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Sukamulia Kec. Panakkukang Kota Makassar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Ada
Pendidikan	: SMP

##### **2. Posisi Kasus**

Pada hari sabtu tanggal 17 september tahun 2016, bertempat di Jalan AP.Pettarani depan gedung PWI Kec.Panakukang Kota Makassar atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Makassar, secara tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang digunakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 17 september 2016 sekitar jam 03.10 wita, bertempat di Jalan AP. Pettarani depan gedung PWI Kec. Panakukang Kota Makassar, ditangkap oleh aparat kepolisian yang sedang patroli karena ditemukan menyimpan, menyembunyikan, menguasai tanpa izin senjata penusuk atau penikam berupa anak (panah) busur terbuat dari besi yang ujungnya runcing berukuran panjang  $\pm$  10cm yang mana pada pangkalnya di beri tali rafia berurai berwarna biru, lengkap dengan ketapel yang terbuat dari besi yang dilengkungkan berbentuk huruf "Y" di lilit isolasi warna hitam dan pada ujungnya di pasang karet keteter yang disimpan disaku sweeter sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, Yang awalnya terdakwa berboncengan sepeda motor dengan saksi Muhammad Yusuf dan saksi Muh. Risal dan melintas di jalan AP. Pettarani lalu melihat aparat kepolisian yang kemudian langsung di berhentikan tepat di jalan AP. Pettarani depan PWI dan saat dilakukan

pemeriksaan dimana di temukan pada diri terdakwa membawa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah anak panah busur yang disimpan di saku sweeter sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dan di bawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut

- b. Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk berjaga-jaga, dan bukan dari komplotan begal
- c. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa busur (anak panah) dan ketapel tersebut
- d. Bahwa senjata jenis busur (anak panah) dan ketapelnya yang tersangka bawa tersebut dapat dipergunakan sebagai senjata tajam atau penikam.

Maka berdasarkan perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No 12 Tahun 1951.

### 3. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam mengadili sebuah perkara pidana dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan di lakukan, dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana



yang di dakwakan dengan menyebut waktu dan tempat kejadian hal ini di atur dalam Pasal 143 KUHP.

Perumusan dakwaan di dasarkan kepada hasil pemeriksaan pendahuluan yang di susun secara tunggal, komulatif, alternatif, ataupun subsidair.

Berdasarkan uraian posisi kasus di atas, maka penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal dengan nomor register perkara PDM-885/MKS/Euh.2/11/2016 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Muhammad Asdi Pratama Bin Asrul pada hari sabtu tanggal 17 september 2016 sekitar pukul 03.10 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu tertentu dalam bulan september tahun 2016, bertempat di jalan AP. Pettarani depan gedung PWI Kec. Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk

Dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Bahwa perbuatan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai, membawa, mempunyai

persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana di atur dan di ancam dalam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951.

#### 4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum menuntut agar majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Muhammad Asdi Pratama Bin Asrul bersalah melakukan tindak pidana membawa dan memiliki senjata tajam berupa anak panah (busur) tanpa di sertai surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.12/Drt/1951(LN.No.78/1951
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Asdi Pratama Bin Asrul dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi masa penahanan terdakwa selama dalam tahanan
- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah senjata tajam jenis anak panah terbuat dari besi yang ujungnya runcing berukuran  $\pm 10$  cm yang mana pada pangkalnya di beri tali rafia berurai berwarna biru, lengkap dengan ketapel yang terbuat dari besi yang di lengkungkan berbentuk huruf “Y” di lilit isolasi warna hitam dan pada ujungnya di pasang karet keteter.

- d. Menetapkan supaya terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

5. Amar putusan

Dalam perkara No.2062/Pid.B/2016/PN.MKS hakim memutuskan :

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa Muhammad Asri Pratama Bin Asrul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa atau memiliki senjata tajam tanpa izin” ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti: 1 (satu) buah senjata tajam jenis anak panah terbuat dari besi yang ujungnya runcing berukuran panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm yang mana pada pangkalnya di beri tali rapih berurai berwarna biru, lengkap dengan ketapel yang terbuat dari besi yang di lengkungkan berbentuk huruf “Y” di lilit dengan isolasi

berwarna hitam dan pada ujungnya di pasang karet ketapel.

Di rampas untuk di musnahkan

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

## 6. Analisis Penulis

Dalam pemeriksaan perkara pidana hakim dituntut untuk mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan. Dengan mengetahui fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Perbuatan terdakwa telah terpenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

### a. Unsur barang siapa

Pengertian barangsiapa disini adalah setiap orang atau badan hukum yang di persamakan dengan orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta menunjuk kepada pelaku delik yang di rumuskan dalam surat dakwaan, dalam hal ini terdakwa Muhammad Asdi Pratama Bin Asrul telah membenarkan telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan telah pula di benarkan oleh terdakwa serta di perkuat oleh keterangan

saksi-saksi, bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa atas dasar kesadarannya dan dilakukan dalam keadaan sehat dan jasmani. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah/janji dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa adalah orang yang di mintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selama persidangan terdakwa dapat memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan kejadian perkara yang diajukan ke persidangan tersebut baik yang itu pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim, penuntut umum, dengan demikian kemampuan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tidak perlu di ragukan lagi.

b. Unsur melawan hukum

Bahwa pengertian sifat melawan hukum dalam hukum pidana merupakan hal pokok yang harus ada/mutlak dalam setiap rumusan tindak pidana. Kata melawan hukum adalah kata yang sudah baku digunakan untuk menerjemahkan kata dari bahasa belanda *onrechtmatige* atau *wederrechtelijk* atau dari bahasa inggris *unlawful*. Dengan demikian *onrechtmatige* atau *wederrechtelijk* atau *unlawfulness* dapat di terjemahkan sifat melawan hukum atau bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur

dari tindak pidana, kedudukan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana begitu sangat penting, sehingga dikatakan perhatian utama hukum pidana yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, karena perbuatan-perbuatan inilah yang di larang dan di ancam pidana.

Bahwa dari berbagai rumusan tindak pidana, Moeljatno menyimpulkan dan membagi unsur melawan hukum menjadi 2 (dua) macam, yakni melawan hukum yang objektif dan melawan hukum yang subjektif. Secara ringkas, melawan hukum yang objektif menurut Moeljatno adalah melawan hukum yang berkaitan dengan perbuatannya sehingga menjadikan perbuatan tersebut terlarang. Apakah melawan hukum di jadikan unsur tersendiri atau tidak. Sedangkan melawan hukum yang subjektif merupakan melawan hukum yang berkaitan dengan segala sesuatu yang ada dalam diri pelaku, maksudnya adalah suatu perbuatan baru akan menjadi terlarang apabila adanya niat yang buruk dari pelaku perbuatan tersebut. Sifat melawan hukumnya tidak di nyatakan dari hal-hal lahir, tetapi di gantungkan kepada sikap bathin pelaku.

Berdasarkan fakta di persidangan di hubungkan dengan keterangan saksi, petunjuk serta keterangan terdakwa ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar jam 03:10 WITA bertempat di jl. A.P.Pettarani kota Makassar;
- Bahwa benar awalnya ketika terdakwa Muhammad Asdi Pratama bin Asrul berboncengan sepeda motor dengan saksi Muhammad Yusuf bin Rincing Paki dan saksi Muh Risal dan melintas Jl. A.P.pettarani lalu melihat aparat kepolisian yang sedang patroli melintas di jalan tersebut dan melihat terdakwa sementara berboncengan tiga kemudian langsung diberhentikan tepat di jalan A.P.Pettarani depan PWI dan saat dilakukan pemeriksaan dimana ditemukan pada diri terdakwa Muhammad Asdi Pratama bin Asrul membawa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu buah anak panah (busur) yang disimpan di saku sweeter sebelah kiri terdakwa, selanjutnya saksi Akbar Johar dan saksi Rumpang bersama anggota polisi lainnya mengamankan terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut

- Bahwa benar terdakwa diinterogasi dimana barang bukti 1 (satu) buah ketapek dan 1 (satu) buah anak panah (busur) oleh terdakwa mengakui adalah miliknya;
  - Bahwa benar baik saksi saksi Muhammad Yusuf bin Rincing Paki maupun terdakwa Muhammad Asdi Pratama bin Asrul membawa barang berupa busur (anak panah) dan ketapel dimana barang yang dilarang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa benar barang bukti yang dibawahnya tersebut terdakwa hanya peruntukkan untuk berjaga-jaga, dan bukan dari komplotan begal, namun perbuatan terdakwa tersebut sudah merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga unsur ini sudah bersesuaian dengan perbuatan terdakwa.
- c. Unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Berdasarkan fakta di persidangan di hubungan dengan keterangan para saksi, petunjuk serta keterangan terdakwa di temukan fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 17 september 2016 sekitar jam 03.10 wita bertempat di jalan AP. Pettarani kota Makassar ;
- Bahwa benar awalnya saksi Rumpang bersama saksi Akbar Johar sementara melaksanakan patroli di wilayah hukum Polrestabes Makassar, dan saat itu melintas di jalan AP. Pettarani lalu melihat terdakwa Muhammad Asdi Pratama Bin Asrul berboncengan sepeda motor dengan saksi Muhammad Yusuf Bin Rincing Paki dan saksi Muh. Risal yang juga melintas di jalan AP. Pettarani sementara berboncengan 3 (tiga) dengan gelagak yang mencurigakan dan kemudian langsung memberhentikan tepat di jalan AP. Pettarani depan PWI dan saat di lakukan pemeriksaan dimana di temukan pada diri terdakwa Muhammad Asdi Pratama Bin Asrul membawa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur (anak panah) yang di simpan di saku sebelah kiri terdakwa, selanjutnya saksi Akbar Johar dan saksi Rumpang bersama anggota polisi lainnya mengamankan terdakwa bersama barang buktinya dan di bawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa benar setelah terdakwa di interogasi dimana barang bukti yang di temukan berupa 1 (satu) buah ketapel dan 1

(satu) buah busur (anak panah) oleh terdakwa adalah miliknya ;

- Bahwa benar saat saksi Rumpang dan saksi Akbar Johar melintas di jalan AP. Pettarani Makassar sudah larut malam sehingga dapat memberhentikan terdakwa yang berboncengan dengan temannya tersebut karena mencurigai adalah komplotan begal ;
- Bahwa benar ketika melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di temukan membawa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur (anak panah), dan pada saat di interogasi mengenai barang bukti yang di bawanya tersebut hanya untuk berjaga-jaga, dan bukan dari komplotan begal ;
- Bahwa benar baik saksi Muhammad Yusuf Bin Rincing Paki maupun terdakwa Muhammad Asdi Pratama Bin Asrul telah membawa barang berupa busur (anak panah) dan ketapel dimana barang yang dilarang dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatannya tersebut sudah bersesuaian dengan unsur pasal ini.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil analisis penulis, maka penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana materiil pada perkara yakni pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 12/Drt/1951 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan terungkapnya

fakta-fakta di persidangan maka benar terdakwa menguasai dalam miliknya dan menyimpan suatu senjata penikam atau senjata penusuk yang dalam hal ini adalah sebuah anak panah yang pada kenyataannya bukan merupakan alat yang digunakan untuk keperluan pertanian, alat untuk keperluan rumah tangga, maupun benda pusaka, selain itu terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan senjata tersebut. Maka perbuatan terdakwa telah memenuhi segala unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan.

## **2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No.2062/Pid.B/PN.MKS**

### **1. Pertimbangan Hakim**

Setelah hakim mengetahui fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan maka yang menjadi pertimbangan hakim adalah:

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa penuntut umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Saksi Rumpang, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga saksi di periksa untuk di dengar keterangan saksi, karena sehubungan terdakwa membawa busur beserta anak panah ;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa di hadapan penyidik dan membenarkan keterangan saksi dalam BAP ;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 17 september 2016 sekitar jam 03.10 wita bertempat di jalan AP. Pettarani kota Makassar
- Bahwa benar awalnya saksi Rumpang bersama saksi Akbar Johar sementara melaksanakan patroli di wilayah hukum polrestabes Makassar, dan saat itu melintas di jalan AP. Pettarani lalu melihat terdakwa Muhammad Asdi Pratama Bin Asrul berbocengan sepeda motor dengan saksi Muhammad Yusuf Bin Rincing Paki dan saksi Muh. Risal yang juga melintas di jalan AP. Pettarani sementara berbocengan 3 (tiga) dengan gelagak mencurigakan kemudian langsung memberhentikan tepat di jalan AP. Pettarani depan PWI dan saat di lakukan pemeriksaan dimana di temukan pada diri terdakwa Muhammad Asdi Pratama Bin Asrul membawa 1 (satu) buah ketapel dan 1

(satu) buah busur (anak panah) yang di simpan di saku sweeter sebelah kiri terdakwa, selanjutnya saksi Akbar Johar dan saksi Rumpang bersama anggota polisi lainnya mengamankan terdakwa bersama barang buktinya dan di bawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa benar setelah terdakwa di interogasi dimana barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur (anak panah) oleh terdakwa mengakui adalah miliknya ;
- Bahwa benar saat saksi melintas di jalan AP. Pettarani Makassar sudah larut malam sehingga dapat memberhentikan terdakwa yang berboncengan dengan temannya tersebut karena mencurigai adalah komplotan begal ;
- Bahwa benar ketika melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di temukan membawa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur (anak panah), dan pada saat di interogasi mengenai barang bukti yang di bawanya hanya untuk berjaga-jaga, dan bukan dari komplotan begal ;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut terdakwa langsung di amankan ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.

Keterangan saksi tersebut di atas di benarkan oleh terdakwa

b. Saksi Akbar Johar, di muka persidangan yang keterangannya di bacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga saksi di periksa untuk di dengar keterangan saksi, karena sehubungan terdakwa membawa busur beserta anak panah ;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa di hadapan penyidik dan membenarkan keterangan saksi dalam BAP ;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 17 september 2016 sekitar jam 03.10 wita bertempat di jalan AP. Pettarani kota Makassar
- Bahwa benar awalnya saksi Rumpang bersama saksi Akbar Johar sementara melaksanakan patroli di wilayah hukum polrestabes Makassar, dan saat itu melintas di jalan AP. Pettarani lalu melihat terdakwa Muhammad Asdi Pratama Bin Asrul berbocengan sepeda motor dengan saksi Muhammad Yusuf Bin Rincing Paki dan saksi Muh. Risal yang juga melintas di jalan AP. Pettarani sementara berbocengan 3 (tiga) dengan gelagak mencurigakan kemudian langsung memberhentikan tepat di jalan AP.

Pettarani depan PWI dan saat di lakukan pemeriksaan dimana di temukan pada diri terdakwa Muhammad Asdi Pratama Bin Asrul membawa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur (anak panah) yang di simpan di saku sweeter sebelah kiri terdakwa, selanjutnya saksi Akbar Johar dan saksi Rumpang bersama anggota polisi lainnya mengamankan terdakwa bersama barang buktinya dan di bawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa benar setelah terdakwa di interogasi dimana barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur (anak panah) oleh terdakwa mengakui adalah miliknya ;
- Bahwa benar saat saksi melintas di jalan AP. Pettarani Makassar sudah larut malam sehingga dapat memberhentikan terdakwa yang berboncengan dengan temannya tersebut karena mencurigai adalah komplotan begal ;
- Bahwa benar ketika melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di temukan membawa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur (anak panah), dan pada saat di interogasi mengenai barang bukti yang di bawanya hanya untuk berjaga-jaga, dan bukan dari komplotan begal ;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut terdakwa langsung di amankan ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.
- c. Saksi Muhammad Yusuf Bin Rincing Paki, di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan sebenarnya ;
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga saksi di periksa untuk di dengar keterangan saksi, karena sehubungan terdakwa membawa busur beserta anak panah ;
  - Bahwa benar saksi pernah di periksa di hadapan penyidik dan membenarkan keterangan saksi dalam BAP ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 17 september 2016 sekitar jam 03.10 wita bertempat di jalan AP. Pettarani kota Makassar
  - Bahwa benar awalnya saksi Rumpang bersama saksi Akbar Johar sementara melaksanakan patroli di wilayah hukum polrestabes Makassar, dan saat itu melintas di jalan AP. Pettarani lalu melihat terdakwa Muhammad Asdi Pratama Bin Asrul berbocengan sepeda motor dengan saksi Muhammad Yusuf Bin Rincing Paki dan saksi Muh. Risal yang juga melintas di jalan AP. Pettarani sementara



berbocengan 3 (tiga) dengan gelagak mencurigakan kemudian langsung memberhentikan tepat di jalan AP. Pettarani depan PWI dan saat di lakukan pemeriksaan dimana di temukan pada diri terdakwa Muhammad Asdi Pratama Bin Asrul membawa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur (anak panah) yang di simpan di saku sweeter sebelah kiri terdakwa, selanjutnya saksi Akbar Johar dan saksi Rumpang bersama anggota polisi lainnya mengamankan terdakwa bersama barang buktinya dan di bawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa benar setelah terdakwa di interogasi dimana barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur (anak panah) oleh terdakwa mengakui adalah miliknya ;
- Bahwa benar saksi Muhammad Yusuf Bin Rincing Paki maupun terdakwa Muhammda Asdi Pratama Bin Asrul membawa barang berupa busur (anak panah) dan ketapel dimana barang yang dilarang dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti yang di bawanya hanya untuk berjaga-jaga, dan bukan dari komplotan begal ;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut terdakwa langsung di amankan ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.

Keterangan saksi tersebut di atas di benarkan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa Muhammad Asdi Pratama Bin Asrul,

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu 17 September 2016 sekitar jam 03:10 WITA bertempat di Jln. AP. Pettarani kota Makassar;
- Bahwa benar awalnya ketika terdakwa Muhammad Asdi Prataman Bin Asrul berboncengan sepeda motor dengan saksi Muhammad Yusuf Bin Rincig Paki dan saksi Muh. Risal dan melintas di jalan AP. Pettarani depan PWI dan saat di lakukan pemeriksaan dimana di temukan pada diri terdakwa Muhammad Asdi Pratama Bin Asrul membawa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur (anak panah) yang di simpan di saku sweeter sebelah kiri terdakwa, selanjutnya saksi Akbar Johar dan saksi Rumpang bersama anggota polisi lainnya mengamankan terdakwa bersama barang buktinya dan di bawa kek kantor polisi guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah terdakwa di interogasi dimana barang bukti yang di temukan berupa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur (anak panah) oleh terdakwa mengakui adalah miliknya ;
- Bahwa baik saksi Muhammad Yusuf Bin Rincing Paki maupun terdakwa Muhammad Asdi Pratama Bin Asrul membawa barang berupa busur (anak panah) dan ketapel dimana barang yang dilarang dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang dibawanya tersebut untuk berjaga-jaga, dan bukan dari komplotan begal ;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut terdakwa langsung di amankan ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka di dapatlah fakta-fakta persidangan, dimana keterangan para saksi yang di dengar di bawah sumpah antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berhubungan dengan keterangan terdakwa serta dengan di ajukan barang bukti di persidangan maka unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam rumusan delik telah terpenuhi semua oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa di nyatakan terbukti dan majelis yakin akan

kesalahan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa majelis tidak melihat adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa tersebut sehingga perbuatan terdakwa dapat di pertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya karenanya harus di hukum pula untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan, penahanan terdakwa harus tetap di lanjutkan agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan hukuman yang akan di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa di tahan, penahanan terdakwa harus tetap di lanjutkan agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan hukuman yang di jatuhkan ;

Menimbang, lamanya terdakwa berada dalam tahanan seluruhnya haruslah di kurangkan dari hukuman yang akan di jatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang di ajukan di persidangan akan di rampas untuk di musnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang ada pada diri terdakwa baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa, sehingga putusan yang akan di jatuhkan dapat mencapai rasa keadilan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum ;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang lain maupun dirinya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 (LN. No.78/1951) serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## 2. Analisa Penulis

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan

kepastian hukum tentang statusnya. Dalam menjatuhkan putusan, keputusan hakim harus mencerminkan keadilan. Hakim dituntut untuk memiliki keyakinan dengan mengaitkan keyakinan tersebut dengan alat-alat bukti yang sah. Berdasarkan tinjauan Yuridis berapapun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas maksimum dan minimum sanksi pidana yang diancam dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana sehingga putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan. Selain itu dalam menjatuhkan pidana bukan hanya faktor yuridis yang harus diperhatikan oleh hakim tetapi juga faktor sosiologinya yang mengarah pada latar belakang mengapa terjadi kejahatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, baik melalui wawancara terhadap hakim yang terkait pada perkara dalam tulisan ini, maupun studi kepustakaan dari dokumen-dokumen yang terkait, dapat penulis simpulkan berdasarkan putusan perkara No.2062/Pid.B/PN.MKS menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Asdi Pratama Bin Asrul telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 (LN. No.78/1951). Hal-hal yang terungkap

dipersidangan sepenuhnya telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1995 (LN No. 78/1951). Terdakwa kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 9 bulan dan dikurangi masa penahanan. Selain itu terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Kemudian prosedur-prosedur persidangan dalam perkara No. 2062/Pid.B/PN.MKS penulis rasa sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, namun ringannya hukuman terkadang kurang efektif atau kurang memberikan efek jera kepada terdakwa dan untuk menjerat pelaku-pelaku lainnya. Padahal seperti yang kita ketahui tujuan utama dalam penjatuhan hukum adalah agar pelaku dan masyarakat yang merasa jera dan tidak akan berani melakukan perbuatan seperti ini karena hukuman yang dijatuhkan hakim akan sangat berat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan penjelasan yang telah diuraikan di atas maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Penerapan hukum pidana materiil pada putusan No. 2062/Pid.B/2026/PN.MKS telah sesuai dengan penerapan hukum dan memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur dari UU No. 2062/Pid.B/2016/PN.MKS. berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Terdakwa yang dianggap sehat, tidak memiliki gangguan pada mental dianggap mampu memepertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim yakni 9 bulan penjara dikurangi masa tahanan dan membayar sejumlah biaya perkara.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 2062/Pid.B/2016/PN.MKS penulis anggap telah tepat dalam menjatuhkan putusan. Dalam memutus perkara hakim harus mempertimbangkan banyak hal. Mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat



bukti serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan maka dengan terpenuhinya unsur-unsur yang sesuai dengan pasal yang di dakwakan, maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa sudah tepat.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan penulis sehubungan dengan penulisan skripsi ini antara lain;

1. Sanksi ringan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kadang tidak memberikan efek jera kepada pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya serta tidak kurang memberikan ancaman kepada masyarakat apabila ingin melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin. Maka diperlukan kecermatan dan kehati-hatian oleh penegak hukum baik oleh jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim dalam memutus perkara.
2. Sebaiknya dilakukan peninjauan ulang terhadap undang-undang tersebut karena pada masa kini sangat banyak kasus-kasus penganiayaan, pembunuhan, perampokan, pembegalan yang diawali oleh pelaku yang membawa senjata tajam tanpa izin sehingga undang-undang harusnya ditinjau kembali agar benar-benar efektif dalam penerapannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Moeljatno, asas-asas hukum pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003

Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994

-----, *Delik-Delik Tersebar Diluar KUHP dengan komentar 1*, PT Pradnya Paramita, 1978,

Wirjono Prodjodikoro , asas-asas hukum pidana di indonesia, PT.Refika Aditama, Bandung, 2003

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2011

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta,2010

Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014

-----, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. 2006

Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung, 1996

Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, P.T Alumni, Bandung, 2006

Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Chairul Huda, *Dari tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang (Drt) No. 12 tahun 1951 tentang mengubah “*Ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*” (STBL 1948 Nomor 17) dan undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948

### **Sumber Lainnya**

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Senjata> , diakses pada tanggal 9 Maret 2017

<http://www.berbagaireviews.com/2015/03/gambar-dan-daftar-lengkap-nama-nama.html> diakses pada tgl 9 Maret 2017

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org) diakses pada tanggal 9 Maret 2017



## PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

JL. R.A. KARTINI No.18/23 TELEPON : 0411 – 3624058 FAX : 0411 – 3634667

WEBSITE : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id) EMAIL : pn.makassar@gmail.com

MAKASSAR 90111

Makassar, 26 April 2017

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/ 120 /HKM/IV/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

#### **BASO RASYID, SH.,MH**

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **TASHAN MUH AKRAM N**  
No.Pokok : B11113540  
Prog. Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin Komp. Griya Fajar Mas A No. 11  
Makassar  
Judul Skripsi : **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
MEMBAWA ATAU MEMILIKI SENJATA TAJAM TANPA IZIN  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO : 2062/PID.B/2016/PN.MKS)**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin , tanggal 07 April 2017, dengan Nomor : 3951/UN4.5.3/PL.02/2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

  
**BASO RASYID, SH.MH**  
NIP.196112101982031007